

Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014)

Ganjar Widhiyoga, Setyasih Harini

Abstrak

Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik internasional. Pola pemerintahan Indonesia sebelum reformasi terpengaruh oleh figur kuat presiden Indonesia, baik Sukarno maupun Suharto, sehingga membuat kebijakan politik luar negeri Indonesia sebelum masa Reformasi pun lekat pada identitas presiden Republik Indonesia. Masa Reformasi dipandang membawa perubahan pada pola pemerintahan Indonesia sehingga menarik mencermati apakah perubahan pola pemerintahan ini berimbas pada perubahan kebijakan politik luar negeri. Penelitian ini meneliti bagaimana peran presiden dalam membangun identitas kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah *role theory*. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa masing-masing presiden memberi warna tersendiri pada identitas politik luar negeri Indonesia, termasuk pada rezim presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kata kunci: politik luar negeri, diplomasi, Indonesia, reformasi

Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014)

Ganjar Widhiyoga^{1,2}, Setyasih Harini¹

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki peran penting dalam percaturan politik internasional. Sejak masa kemerdekaannya, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam proses politik internasional. Aktivisme Indonesia dalam percaturan politik internasional ini dapat terlihat pada upaya Indonesia memelopori Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955 yang berujung pada lahirnya Gerakan Non-Blok, memelopori berdirinya ASEAN dan lain-lain.

Aktivisme Indonesia dalam percaturan politik internasional sebelum masa reformasi ditandai dengan slogan politik luar negeri “bebas dan aktif” (Clark, 2011). Dengan identitas ini, Indonesia berusaha untuk menjaga netralitas di antara dua blok besar dunia yang sedang berseteru – Blok Barat dan Blok Timur. Aktivitas ini diibaratkan oleh Mohammad Hatta (1988) seperti “mendayung di antara dua karang”, perjalanan yang penuh bahaya dan jika terlalu dekat dengan salah satu karang –yang menjadi metafora kedua kubu yang berseteru, akan berujung pada karamnya “kapal” Indonesia.

Dalam perkembangannya, identitas politik luar negeri “bebas dan aktif” ini terwarnai oleh arahan presiden Indonesia yang menjabat sekaligus kondisi politik internasional saat itu. Indonesia berkeinginan untuk berada pada posisi netral. Di masa pemerintahan Presiden Sukarno, Indonesia pada awalnya mengambil jarak dari kedua blok internasional yang terlibat dalam Perang Dingin. Namun, orientasi ini kemudian bergeser menjadi lebih condong ke Blok Timur. Hal ini ditandai dengan munculnya slogan *Nekolim* yang mengarah pada kebijakan anti-Barat. Lebih lanjut lagi, upaya merapat ke Blok Timur itu terlihat pada upaya Sukarno membentuk Poros Jakarta-Peking (Weinstein, 2007, pp. 298–300).

Ketika Presiden Suharto memimpin Indonesia, identitas politik luar negeri “bebas dan aktif” masih dipertahankan, akan tetapi aplikasinya mengalami perubahan. Dengan menggunakan slogan “kembali pada Pancasila dan UUD 1945”, Suharto mengubah kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi bergeser ke Blok Barat, dari yang awalnya terlihat seolah cenderung dekat dengan blok Timur. Kecenderungan pada Blok Barat ini terlihat dengan aktivitas Indonesia dalam mengejar bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara di blok Barat (Batabyal, 2016).

Seiring dengan perubahan kepemimpinan, identitas politik Indonesia juga berpotensi mengalami pergeseran identitas. Pada akhirnya, perubahan politik

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.

² Korespondensi melalui ganjar.widhiyoga@gmail.com

dalam negeri di Indonesia berujung pada runtuhnya Orde Baru. Di masa Reformasi ini, terjadi pergantian presiden Republik Indonesia selama beberapa kali seiring dengan dinamika internal maupun proses pemilu di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di era sebelum Reformasi, setiap presiden akan membawa gaya dan orientasi politik luar negerinya sendiri.

Kondisi inilah yang menjadi hal menarik untuk diteliti. Suatu negara tidaklah memiliki identitas politik secara tunggal dan konsisten sepanjang waktu. Identitas politik ini dapat berubah seiring dengan perjalanan politik negara. Sementara perjalanan ini paling banyak dipengaruhi oleh pemimpin politik negara tersebut. Oleh karena itu, penting kiranya untuk meneliti bagaimana gaya dan orientasi ini berpengaruh terhadap identitas politik luar negeri Indonesia di masa Reformasi. Dari latar belakang masalah di atas, artikel ini ingin meneliti bagaimana identitas politik luar negeri Indonesia di masa Reformasi (1999-2014)?

Role Theory

Untuk melakukan analisis terhadap politik luar negeri, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori dari Valerie Hudson yang termaktub dalam bukunya, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory* (2007). Menurut Hudson, untuk melakukan analisis terhadap politik dan kebijakan luar negeri, peneliti harus melihat pada pola kebijakan dan kaitannya terhadap kondisi eksternal yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut (Hudson, 2007, p. 4).

Dalam jurnalnya yang berjudul *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*, Hudson (2005) juga menjelaskan bahwa dasar dari studi dalam hubungan internasional sendiri terletak pada para pembuat keputusan, baik yang bertindak secara sendiri-sendiri atau pun berkelompok. Dalam arti, dasar hubungan internasional ini harus dilakukan dengan memahami bagaimana manusia merasakan dan bereaksi terhadap dunia di sekitar mereka, dan bagaimana manusia terbentuk dan dibentuk oleh dunia di sekitar mereka (Hudson, 2005, p. 1).

Dalam perkembangannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan analisis terhadap politik luar negeri. Pertama adalah bagaimana proses pengambilan keputusan terjadi. Proses pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh faktor makro, seperti kondisi politik internasional, dan faktor mikro, seperti proses pada institusi terkait. Kedua adalah adanya pengaruh dari individu maupun grup yang terlibat dalam pengambilan kebijakan (Garrison, 2002, p. 155).

Keterlibatan individu ini dalam mempengaruhi politik luar negeri tidak lepas dari kondisi sosio-psikologis pengambil kebijakan. Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia tentu memiliki pengaruh yang terbesar, sehingga presiden mampu menentukan identitas politik luar negeri Indonesia. Beberapa literatur yang membahas tentang bagaimana individu dapat mempengaruhi identitas dalam kebijakannya antara lain Berger and Luckmann

(1966), Chafetz *et al.* (1998) dan Hellman and Jorgensen (2015). Pada intinya, pembahasan mereka merujuk pada *Role Theory*.

Sementara Hellman and Jorgensen (2015) menerangkan bagaimana keterkaitan antara peran ini terhadap kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Merujuk dari Bjola and Kornprobst (2011), Hellman and Jorgensen menyatakan bahwa kebijakan luar negeri seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang sering berubah secara singkat, ketimbang sebagai praktek konstitutif politik global kontemporer yang ajeg. Perubahan yang terjadi dalam arah politik luar negeri ini dianggap bukan sesuatu yang mengejutkan.

Salah satu penyebab dari perubahan arah kebijakan adalah adanya transfer otoritas politik yang terjadi dari negara terhadap lingkup otoritas yang lebih luas di atasnya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara negara dengan otoritas transnasional dengan segala kebijakannya. Adanya transformasi hubungan internal-eksternal yang berlangsung dalam suatu negara ini berpotensi mendorong termodifikasinya ide-ide kedaulatan hingga pada akhirnya mengubah cara berpikir tentang kebijakan luar negeri. Di sisi lain, adanya pemerintahan global yang terus berkembang juga menjadi pendekatan yang relevan dalam mengubah arah kebijakan luar negeri suatu negara (Hellman, Jorgensen, 2015, p. 3).

Role Theory pertama kali dimunculkan dan menjadi perhatian dalam literatur kebijakan luar negeri setelah dipublikasikan oleh K. J. Holsti's (1970) yang mempelajari tentang konsep peran dalam suatu negara. Holsti memusatkan perhatiannya pada ide sederhana tentang "peran diri" yang merujuk pada pemimpin suatu negara. Dari diri pemimpin inilah, terdapat keyakinan atau gambaran tentang bagaimana ia mengidentifikasi suatu negara. Lebih lanjut, konsep peran negara yang dijalankan oleh pemimpin inilah yang akan mempertegas atau membentuk cara dari suatu negara dalam bertindak untuk menanggapi sistem internasional (Thies, 2009, p. 5).

Konsep ini dikenal sebagai "*national role conception*". Dengan konsep inilah, Holsti berusaha untuk menangkap jawaban tentang bagaimana suatu negara melihat dirinya sendiri dan memainkan perannya dalam arena hubungan internasional. Konsep peran nasional ini merupakan representasi dari persepsi para elit politik dari negara karena para elit politik inilah yang memegang peran dalam menjalankan suatu negara. Elit politik ini pula yang lebih cenderung menonjolkan persepsi-persepsinya sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri negara. Pada akhirnya, persepsi ini membentuk identitas politik luar negeri suatu negara.

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan argumen utama. Metode kualitatif merupakan metode yang sangat menarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang sosial-politik karena metode ini mengumpulkan informasi yang mendalam dari beberapa sumber (Burnham, 2008, p. 31). Metode kualitatif membangun sebuah analisis dan gambaran yang kompleks dan menyeluruh mengenai suatu masalah sosial. Analisis dan gambaran

ini disusun berdasarkan pada penyelidikan yang mendalam dan pengumpulan informasi dari beberapa sumber yang dilakukan dalam kondisi alami fenomena tersebut (Creswell and Poth, p. 15).

Metode Penelitian

Politik Luar Negeri suatu negara pada dasarnya selalu mengarah pada usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri inilah yang menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negaranya. Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari kondisi dalam negerinya, yang pada saat bersamaan juga dipengaruhi perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan regional dan internasional.

Pengumpulan data akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik studi literatur. Pengambilan data dengan teknik studi literatur memusatkan perhatian pada telaah dokumen dan literatur yang ada terkait dengan obyek penelitian. Dokumen dan literatur menjadi penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan akses pada informasi yang telah lama berlalu, tidak tersedia secara lisan ataupun informasi memiliki banyak versi sehingga perlu dibandingkan.

Dalam melakukan studi literatur, seorang peneliti harus memahami aturan sosial dan konteks saat literatur tersebut diproduksi serta latar belakang pemikiran aktor yang memproduksi literatur tersebut (Chase, 2005). Karena ada kemungkinan bahwa literatur terkait obyek yang akan diteliti memiliki jumlah yang sangat banyak dan bentuk yang bervariasi maka peneliti perlu melakukan pengelompokan prioritas sumber literatur. Sumber literatur primer adalah literatur yang menjadi bagian langsung atau diproduksi karena peristiwa yang akan diteliti.

Literatur primer juga berupa literatur yang diproduksi untuk kalangan terbatas dari kelompok yang akan diteliti. Sumber literatur sekunder adalah literatur yang terkait dengan atau diproduksi setelah peristiwa yang akan diteliti. Literatur sekunder tersedia untuk umum segera setelah peristiwa tersebut terjadi. Sumber literatur tersier adalah literatur publik yang ditulis untuk membangun ulang peristiwa terkait (Burnham, 2008, pp. 165–166).

Penelitian ini menggunakan studi literatur pada literatur primer berupa dokumen arahan kebijakan luar negeri dari pemerintahan Abdurrahman Wahid, Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini juga akan menggunakan literatur tersier berupa tulisan-tulisan pihak ketiga tentang pemberitaan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia atau analisis terhadap pelaksanaan politik luar negeri tersebut. Pemakaian literatur tersier ini untuk mendukung peneliti dalam mengevaluasi aktivitas politik luar negeri yang telah berlangsung.

Politik Luar Negeri Indonesia

1. Pemerintahan Sukarno

Politik Luar Negeri suatu negara pada dasarnya selalu mengarah pada usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri inilah yang menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negaranya. Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan refleksi dari kondisi dalam negerinya, yang pada saat bersamaan juga dipengaruhi perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan regional dan internasional.

Namun, meskipun dalam implementasinya, politik luar negeri dapat berubah secara dinamis, politik luar negeri suatu bangsa biasanya tetap memiliki patokan tertentu sebagai landasannya. Di Indonesia, politik luar negeri Indonesia memiliki beberapa landasan, berupa landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional.

Adapun landasan idiil politik luar Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang berisi lima dasar negara berupa : (1) Ketuhanan Yang Maha Es; (2) Kemanusiaan yang adil beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila inilah yang menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal. Sila-sila ini mencakup seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk bagi kebijakan luar negeri.

Sedangkan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah UUD 1945, tepatnya pada alinea pertama dan alinea keempat, dan juga terletak pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13. Adapun isi dari alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Sedangkan pada alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 berisi :

“... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ...”.

Pada pasal 11 UUD 1945 (amandemen), isinya berbunyi :

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.”

Dan pada pasal 13 UUD 1945 (amandemen) Ayat 1, berisi :

“Presiden mengangkat duta dan konsul.”

Ayat 2:

“Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ayat 3:

“Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Sementara sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia, menggunakan prinsip bebas aktif. Pengertian politik “bebas aktif” yang dimaksud di sini, menurut Hatta, berarti politik “Bebas” yang merujuk pada tindakan Indonesia yang tidak berada dalam kedua blok, baik blok Barat maupun Blok Timur dunia, dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sementara arti “Aktif” sendiri berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok (Mohammad Hatta, 1976:17).

Prinsip bebas dan aktif inilah yang perlu dioperasionalkan dalam setiap tindakan politik luar negeri Republik Indonesia. Sekalipun demikian, operasional prinsip ini dapat berubah sesuai dengan kepentingan nasional yang dapat berubah di setiap periode pemerintahannya. Politik luar negeri di Indonesia selama ini di setiap periode juga menunjukkan adanya identitas dan karakteristik yang khas.

Ketika masa Orde Lama, politik luar negeri yang dijalankan Indonesia cenderung menunjukkan kedekatan terhadap kubu negara-negara di blok Timur atau negara-negara dengan haluan komunis. Indonesia bahkan menerapkan prinsip Nasional-Sosialis-Komunis sebagai elemen di setiap jenjang pemerintahannya. Tindakan yang diambil juga tampak bergaya konfrontatif. Hal ini terlihat dari cerminan sikap Presiden Soekarno yang menunjukkan sikap tegas dalam setiap sikap dan perkataannya.

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia di Orde Lama sebagian besar banyak ditunjukkan melalui maklumat dan pidato – pidato Presiden Soekarno. Beberapa pidato yang disampaikan antara lain Maklumat Politik Pemerintah yang dikeluarkan pada 1 November 1945, pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita (Jarek)” pada tanggal 17 Agustus 1960, serta pernyataan Presiden Soekarno dalam “Perincian Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”, yang kemudian ditetapkan sebagai garis – garis besar politik luar negeri Republik Indonesia dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No. 2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961 (Wuryandari, Ed., 2008: 28-30).

Sedangkan pada Orde Baru, kecenderungan karakteristik politik luar negeri Indonesia justru lebih condong dengan kubu negara-negara Barat dengan gaya *Low Profile-Kooperatif*. Pemerintah lebih senang menunjukkan karakteristik yang *low profile* disertai upaya-upaya membangun kerja sama yang baik di berbagai bidang.

Landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang digunakan di masa Orde Baru ini juga dipertegas dengan kerangka formal berupa peraturan-peraturan resmi. Adapun peraturan tersebut, meliputi : Ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973, Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan

Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri.

Selain itu, landasan operasional ini juga diterangkan di dalam TAP MPR yang berisi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), berupa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 TAP MPR RI No. IV/MPR/1978; TAP MPR RI No. II/MPR/1983; TAP MPR RI No. II/MPR/1988; dan TAP MPR RI No. II/MPR/1993. (Wuryandari,Ed., 2008: 31-33).

Adapun pada periode selanjutnya, yakni pada periode Orde Reformasi, karakteristik umumnya adalah lebih condong untuk usaha-usaha pembangunan persahabatan dengan semua negara dengan gaya aktif diplomatis. Sekalipun, pada masing-masing periodenya masih tampak karakteristik yang lebih khas sebagai identitas politik luar negeri yang dibangun oleh masing-masing pemimpin. Karakteristik khas yang menjadi identitas politik luar negeri di masing-masing periode inilah yang dikupas lebih dalam di dalam penelitian ini.

Analisis Politik Luar Negeri RI di Masa Reformasi

1) Rezim Gus Dur

Identitas politik luar negeri pasca reformasi mulai menunjukkan karakter yang lebih khas diawali dari Rezim Gus Dur. Pada masa Gus Dur menjabat menjadi presiden, kondisi negara Indonesia masih dalam pembenahan pasca revolusi. Pembenahan ini terjadi di hampir segala bidang, mulai dari sosial, ekonomi, pertahanan hingga politik. Selanjutnya, untuk melakukan analisa terhadap identitas politik luar negeri, peneliti harus melihat pada pola kebijakan dan kaitannya terhadap kondisi eksternal yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut (Hudson, 2007, p. 4).

Beberapa gebrakan yang diambil Gus Dur yang dapat menjadi indikator pergeseran arah politik luar negeri Indonesia seperti dicetuskannya rencana penguatan hubungan dengan Israel. Hal ini disampaikan Gus Dur hanya beberapa saat setelah ia dilantik sebagai presiden RI. Selain itu, Gebrakan lain disampaikan Gus Dur ketika ia menyampaikan gagasannya mengenai pembentukan aliansi strategis Indonesia-Cina-India. Gagasan ini disampaikan bersamaan dengan kunjungannya ke beberapa negara di Asia (Munthe, 2006, p. 191).

Sejalan dengan *role theory*, rezim suatu negara akan banyak dipengaruhi oleh individu maupun grup yang terlibat dalam pengambilan kebijakan (Garrison, 2002, p. 155). Dalam hal ini, Gus Dur sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan RI-lah yang mengambil peran ini dan menjadi aktor dominan dalam menentukan identitas politik luar negeri Indonesia kala itu. Dalam tataran teoritis, identitas politik luar negeri RI tidak hanya dapat berkaca pada pengambilan keputusan dengan gaya "*bureucratif polity*" melainkan cenderung pada *rational actor* yang mengambil peran dan pengaruhnya terhadap penentuan arah kebijakannya.

Gus Dur adalah sosok dengan karakter yang cenderung rasional. Gaya individu Gus Dur ini pula yang mewarnai langkah Gus Dur dalam melakukan

hubungan luar negeri. Pemikiran pribadi Gus Dur serta visi-visi pribadi Gus Dur mewarnai arah politik luar negeri Indonesia dalam banyak hal. Jika dibandingkan dengan Soeharto dan BJ Habibie, arah politik luar negeri Indonesia tampak cenderung berbeda. Soeharto dan BJ Habibie memiliki karakter pribadi yang cenderung birokratis. Kedua presiden sebelumnya ini lebih banyak mengandalkan pada konsultasi dengan menteri-menterinya dalam membuat keputusan.

Gus Dur mengambil berbagai kebijakan dengan inisiatif pribadinya tanpa menunggu usulan dari para menterinya. Dalam hal ini, Gus Dur meletakkan visi-visi pribadinya dalam membangun hubungan luar negeri, seperti dalam gagasannya membentuk aliansi Indonesia-Cina-India, adanya visi untuk membangun hubungan luar negeri yang baik dengan Israel, serta adanya undangan kepada pemerintahan Amerika Serikat untuk turut terlibat dalam usaha-usaha menangani korupsi dalam pemerintahan Indonesia.

Hal ini dapat merujuk pada sikap Gus Dur sebelum menjabat sebagai seorang presiden. Gus Dur terkenal memiliki sikap toleran terhadap semua agama. Menurutnya, kebenaran “mutlak” hanyalah milik Tuhan, sedangkan kebenaran yang ada pada manusia adalah kebenaran “relatif”. Dengan bekal pandangan demikian, Gus Dur menjadi sosok yang berjiwa toleran terhadap agama dan keyakinan apapun, termasuk terhadap agama-agama samawi (Bakhtir, 2008, p. 23). Karena prinsip ini pula, Gus Dur tidak bersikap ragu-ragu dalam membina hubungan dengan Israel, China, India juga Amerika Serikat. Tidak ada landasan berpikir terkait keagamaan, sekalipun ia termasuk sosok kyai yang religius. Karenanya, hubungan luar negeri yang dibina lebih mengarah pada upaya-upaya untuk dapat mencapai prioritas kepentingan nasional yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, dengan prinsip rasionalitas aktor yang mendominasi pemerintahan, Gus Dur menjadikan karakter birokrasi di Indonesia menjadi cukup lemah, dari segi soliditas serta dari segi kemampuan untuk merespon persoalan. Sebab, Gus Dur dengan karakternya yang kuat mempengaruhi nuansa dalam pemerintahan sehingga dalam implementasi pemerintahannya menempatkan presiden menjadi figur dominan. Presiden membayangi tindakan birokrasi sehingga eksistensi birokrasi ini terlihat lemah. Hal ini juga terjadi dalam tindakan-tindakan terkait politik luar negeri Indonesia masa itu.

Identitas politik luar negeri yang dibangun oleh Presiden Abdurrahman Wajid ini memang sering menjadi sorotan publik karena begitu khas. Dalam menjalankan politik luar negeri dan diplomasi selama dua tahun menjabat sebagai presiden, Gus Dur mengambil peran “aktor utama” (*chief diplomat*). Hal ini berdasarkan pada padatnya aktivitas kunjungan presiden luar negeri. Bahkan, tercatat rekor kunjungan hingga lebih dari 50 negara di lima benua. Gus Dur dikatakan sebagai presiden RI pertama yang telah mengunjungi lima benua di dunia dalam rangka menjalankan diplomasi sebagai bagian politik luar negeri Indonesia. Bahkan, Gus Dur menghabiskan 23 dari 40 hari pertama masa pemerintahannya untuk tur keliling dunia (Shambazy, 2010). Bahkan, total

kunjungan Gus Dur dalam 20 bulan masa kepemimpinannya mencapai 80 kunjungan (Alami, 2006, p. 174).

Selain itu, yang mengundang banyak keraguan dari pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi yang dilakukan Gus Dur melalui kunjungan ke mancanegara ini adalah karena pelaksanaannya yang dianggap tidak berdasarkan pada “cetak-biru”. Dengan kata lain, diplomasi ini dianggap tidak memiliki “profil” yang jelas ke arah mana kebijakan luar negeri yang ditargetkan untuk dijalankan. Bahkan, menanggapi hal ini, beberapa kalangan, termasuk wakil rakyat, menyatakan kritiknya bahwa pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan Gus Dur amat tidak jelas (*in total disarray*).

2) Rezim Megawati Soekarnoputri

Setelah mendapatkan mandat baru sebagai Presiden RI, Megawati segera menyusun strategi dan rencana untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Adapun prioritas dalam politik luar negeri yang disampaikan dalam pidato tersebut, adalah “*conducting the free and active foreign policy, recovering state’s and nation’s dignity and returning the trust of foreign countries, including international donor institutions and investors, to the government*,” atau “melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah” (Soekarnoputri, 2001).

Selain pada prioritas tersebut, Megawati juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, apa yang ditargetkan untuk dicapai tersebut intinya harus pula memerhatikan hal-hal seperti ‘*recovery and the efforts to maintain the stability of our national security and defence. We do need an effective, highly discipline system as well as security apparatus, which are under the control of the government but remain inspired by the people’s aspiration*’. Atau yang berarti keharusan akan adanya upaya pemulihan dan menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan nasional Indonesia, sehingga Indonesia membutuhkan sistem yang efektif, sangat disiplin, serta aparat keamanan, yang berada di bawah kendali pemerintah, tetapi tetap terinspirasi oleh aspirasi masyarakat.

Berbagai pernyataan Megawati terkait strategi ini disampaikan dengan menyesuaikan pada kondisi Indonesia kala itu yang sedang dihadapkan pada banyak permasalahan mendasar rakyat. Indonesia tengah menghadapi krisis berkepanjangan di segala bidang yang masih belum juga teratasi pada pemerintahan sebelumnya. Permasalahan yang kompleks inilah yang harus dihadapi pemerintahan Megawati-Hamzah Haz sehingga dibutuhkan visi, misi, prioritas program kerja yang mampu mengakomodasi kepentingan rakyat.

Dalam usaha pemulihan ekonomi rakyat, pemerintah Megawati berupaya mendapatkan suntikan dana dari IMF. Pemerintah Megawati cenderung menunjukkan karakter yang patuh dan birokratif sehingga dengan tanpa hambatan berarti, bersedia menjalankan paket kebijakan dari IMF. Kebijakan ini sekaligus

menunjukkan arah politik luar negeri Indonesia yang condong ke arah Blok Barat. Karena memandang pentingnya suntikan dana dari IMF dalam usaha pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah bersedia melakukan privatisasi BUMN dan bantuan likuiditas sesuai kebijakan pemberi bantuan.

Paket kebijakan dari IMF nyatanya kontraproduktif dengan kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia justru semakin terpuruk ekonominya dan bahkan hampir membangkrutkan sistem moneter Indonesia. Menghadapi hal ini, pemerintah Megawati berupaya menuntut IMF bertanggung jawab atas paket kebijakan yang disarankan, yang ternyata gagal bagi usaha pemulihan ekonomi Indonesia. Hasilnya, pemerintah merasa cukup puas, meski kompensasi yang diberikan hanya sebatas penjadwalan ulang masa cicilan utang Indonesia (Alami, 2006, p. 176)

Pada prioritas selanjutnya, yakni mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah disintegrasi bangsa dan memulihkan stabilitas keamanan. Perumusan visi misi ini adalah hal penting dalam upaya memberi arah tepat dan efisien yang mampu mencapai pemulihan situasi di segala bidang demi kesejahteraan rakyat.

Identitas politik luar negeri yang dibangun oleh Megawati menunjukkan kesan yang sama sekali berbeda dengan Gus Dur. Sesuai dengan perbedaan pada karakter pribadinya, Megawati telah lebih banyak melimpahkan tugas diplomasi dan pelaksanaan politik luar negeri kepada figur menteri luar negerinya. Dalam hal ini, sesuai ketentuan birokrasi, Presiden Megawati memang dapat menunjuk figur Menteri Luar Negeri yang memang sepenuhnya fokus bertugas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri.

Sebagai bentuk implementasinya, Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirayuda, yang menjabat kala itu segera mencanangkan program Benah Diri dengan konsep Diplomasi Total. Tujuan dari diplomasi total ini adalah agar dapat melibatkan berbagai sektor masyarakat untuk memerankan profil diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia (Alami, 2016, p. 169).

Implementasi dalam konsep diplomasi total memerlukan adanya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang integratif dalam perspektif intermestik internasional domestik. Diplomasi total ini menghendaki agar kebijakan luar negeri yang dihasilkan tidak hanya sebagai domain kementerian luar negeri semata, melainkan juga diperankan oleh masyarakat sebagai bagian dari kebijakan diplomasi total.

Implementasi dari konsep diplomasi total ini di antaranya diwujudkan dalam bentuk kegiatan *Foreign Policy Breakfast*. Adapun kegiatan ini berupa forum mingguan yang mengundang berbagai pemangku kepentingan guna membahas isu tertentu. Manfaatnya, diharapkan dapat memberikan input data dan informasi bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia (Alami, 2016, p. 169).

Dengan karakternya yang cenderung birokratif, Presiden membangun nuansa pemerintahan yang birokratif pula. Ini membuat DPR mengambil peran lebih besar dalam pemerintahan RI sehingga tidak lagi difungsikan sebagai institusi stempel yang melegitimasi kebijakan pemerintah semata. Lebih dari itu, DPR RI menjadi lembaga yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sikap kritis legislatif ini contohnya dapat dilihat dalam isu penting kala itu, ketika DPR RI melakukan penolakan untuk meratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan Defence Cooperation Agreement DCA antara Indonesia Singapura. Penolakan ini atas dasar adanya kesalahan prosedural dalam proses perjanjian ini karena pemerintah tidak melibatkan DPR RI dalam membahas substansi perjanjian tersebut sejak awal (Alami, 2006, p. 170).

Identitas politik luar negeri Indonesia era Presiden Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa Presiden tidak memegang peran dominan, dan justru banyak menyerahkannya pada Menteri Luar Negeri. Arah politik luar negeri Indonesia juga masih tidak memiliki ketegasan, karena cenderung patuh terhadap pihak lain, yang dianggap memiliki *bargaining position* lebih tinggi dari pemerintah Indonesia, seperti IMF. Ini membuat banyak kedekatan yang dibina dengan pihak blok Barat, karena pihak blok Barat bersama organisasinya lah yang banyak membantu pemulihan stabilitas nasional Indonesia, sekalipun dengan mengajukan persyaratan khusus untuk dipatuhi Indonesia.

3) Rezim Susilo Bambang Yudhoyono

Rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimulai sejak tahun 2004, setelah kemunduran Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI. Pada rezim SBY yang dijalankan selama dua periode, pemerintahan dilaksanakan dengan dukungan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I (2004-2009) dan jilid II (2009-2014). Dari segi politik luar negeri, kabinet ini meletakkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia pada tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004 – 2009, yang isinya meliputi :

- a) Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Upaya ini memiliki tujuan pokok untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Jika merujuk pada pidato Bung Hatta pada 15 desember 1945, yang menyatakan bahwa “politik luar negeri yang dijalankan oleh Negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”, langkah ini dinilai sejalan dengan orientasi awal berdirinya bangsa Indonesia. Seluruh rakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat di belakang pemerintah Indonesia. Sejalan yang disampaikan oleh Hatta selanjutnya, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan”.

- b) Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN. Hal ini merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia, dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- c) Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional. Poin ini dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional sebagai upaya untuk mengatasi masalah keamanan internasional. Adapun komitmen terhadap perdamaian internasional yang dimaksud ini relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia, sebagaimana yang telah dituangkan dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Windiani, 2013, p. 3).

Identitas politik luar negeri Indonesia era rezim SBY paling menonjolkan konsep diplomasi *soft power*. Konsep diplomasi *soft power* diusung pertama kali pada tahun 2005 dalam pidato SBY di AS. Pada saat tersebut, SBY menyatakan agar AS lebih mengandalkan *soft power* ketimbang *hard power*. Sejak pernyataan ini pula, konsep diplomasi *soft power* menjadi identitas tertentu dari karakter diplomasi dan politik luar negeri yang dibangun di rezim SBY. Konsep ini juga terus bergulir dan banyak dibahas di kalangan *policy making circle*, baik dalam periode pertama maupun kedua masa pemerintahan SBY.

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Presiden SBY memiliki filosofi berupa, jika kita menggunakan *hard power*, orang akan lebih melawan kita, akan tetapi jika kita menggunakan *soft power*, yakni berupa persuasif, pendekatan budaya, psikologis dan lain sebagainya, ini akan membuat orang akan lebih mudah menerima kita. Filosofi ini pula yang ditegaskan oleh SBY bahwa dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak ingin menerapkan *hard power* melainkan *soft power* (Djalal, 2013). Hal ini diterapkannya selama menjabat di dua periodenya.

Soft power menjadi bentuk diplomasi yang dapat dilakukan lewat berbagai bidang selain militer, seperti pertukaran budaya, kerja sama ekonomi, pendidikan, investasi, dialog antar agama dan lain sebagainya. *Soft power diplomacy* ini dapat menjadi identitas baru dalam berpolitik luar negeri dengan gaya yang elegan. Ini dapat terwujud ketika negara memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya yang ada di negerinya dengan baik, karena sumber daya inilah yang menjadi modal utama dalam konsep diplomasi dengan *soft power*.

Konsep *Soft Power* yang menjadi identitas tersendiri dari SBY ini juga dilontarkan SBY dalam Asia Europe Meeting (ASEM) di Beijing, yang berlangsung pada bulan Agustus 2010. Pada saat tersebut, SBY menyampaikan kritiknya terhadap penggunaan *hard power*, lewat pernyataannya berupa

“Saya menyampaikan kritik di depan para pemimpin bahwa masih banyak pemikiran yang menggunakan hard power. Abad 20, adalah abad yang penuh hard power yang ditandai dengan dua perang dunia dan konflik. Saya harap abad ini bisa menjadi abad soft power,” (Windiani, 2013, p. 7).

Selanjutnya, rezim SBY secara konsisten menjalankan diplomasi *soft power*. Cita rasa berdiplomasi dengan *soft power* era SBY ini juga menjadi perwujudan upaya dalam mencapai tujuan hubungan luar negeri Indonesia yang menginginkan *a million friend, zero enemy*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh SBY dalam pidatonya dalam rangka menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-65, yakni :

Dulu, Bung Hatta pernah melukiskan tantangan politik luar negeri sebagai “mendayung di antara dua karang”, dalam arti antara Blok Barat dan Blok Timur. Kini, saat persaingan Blok Barat dan Blok Timur sudah hilang, diplomasi Indonesia di Abad ke-21 menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks, ibarat “mengarungi samudera yang penuh gelombang” (Yudhoyono, 2012).

Dalam membina hubungan luar negeri, SBY menggunakan perbandingan dengan masa Orde Lama, ketika situasi global masih bersitegang antara blok Barat dan Blok Timur. Namun, ketika situasi dunia telah berubah, tantangan kekinian juga turut berubah. Perubahan ini lebih mengarah pada ambivalensi polaritas yang membentuk dunia menjadi kompleks dengan segala gelombang dinamika perpolitikannya. Atas dasar kondisi inilah, pemerintah merasa lebih tepat jika mengambil langkah strategis dalam politik luar negerinya untuk mengedepankan prinsip *million friends zero enemy*.

Hanya saja, dalam implementasinya, prinsip ini menjadikan Indonesia dilema dalam menentukan sikap. Prinsip ini seolah menjadi beban ketika pemerintah harus bersikap asertif dalam membina hubungan luar negeri. Bahkan, dikatakan bahwa Indonesia menjadi lemah dan tidak menunjukkan ketegasan dalam bersikap. Contohnya saja, hal ini tampak dari sikap pemerintah Indonesia yang justru ragu ketika harus memberi peringatan tegas kepada pihak Malaysia dan Arab Saudi yang seringkali terlibat dalam kasus TKI. Dengan prinsip *zero enemy*, diplomasi yang dijalankan sebisa mungkin tidak menimbulkan tendensi buruk sehingga menyiratkan konflik.

Konstruksi pemikiran luar negeri Presiden SBY juga sering menekankan pada konektivitas, sebagai wujud upaya Indonesia agar mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak dengan memanfaatkan proses diplomasi *soft power*. Jaringan yang baik dengan semua pihak ini dianggap mampu menentukan pengaruh dan kemampuan Indonesia dalam keterlibatannya membentuk tataran dunia yang dikehendaki.

Berada pada posisi netral di antara berbagai pihak membuat Indonesia cenderung lebih mudah dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dunia, tanpa menimbulkan sentimen dari pihak lain. Hanya saja, di sisi lain sikap ini

mencerminkan bahwa dalam kancah perpolitikan dunia, Indonesia berupaya menempatkan diri pada posisi aman. Politik luar negeri yang dijalankan pada rezim SBY sering dianggap lemah dalam menunjukkan kedaulatan Indonesia. Identitas politik luar negeri Indonesia sebatas pada konsep mengedepankan *soft power*, akan tetapi tanpa karakter yang tegas, terkait identitas seperti apa yang akan ditunjukkan.

Dengan menjalankan prinsip ini, pemerintah Indonesia sering mendapat sorotan akan kedaulatannya. Salah satu contoh lain adalah adanya insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada Agustus 2010. Insiden penangkapan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di perairan dekat pulau Bintan. Penangkapan ini terjadi lantaran petugas Indonesia tersebut tengah melakukan operasi dan menangkap lima kapal berbendera Malaysia yang sedang mengambil ikan di perairan Indonesia. Bukannya menangkap pelaku pengambil ikan, petugas Indonesia justru yang ditangkap (Naibaho, 2010).

Insiden yang berlangsung cukup pelik ini rupanya dianggap membuahkan hasil yang tidak cukup memuaskan oleh berbagai pihak. Kontroversi Bintan merupakan bentuk pelanggaran terhadap batas kedaulatan RI. Namun, insiden besar ini hanya menghasilkan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang disepakati di Kinabalu September 2010 (Kemlu, 2010).

Hasil inilah yang dianggap tidak cukup menguntungkan bagi Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia tidak cukup tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam teritorinya, yang terkait dengan hubungan luar negeri. Khalayak umum berharap agar pemerintah Indonesia bisa lebih tegas sehingga hasil yang diperoleh dari perundingan cukup menguntungkan Indonesia. Dibutuhkan ketegasan agar pemerintah Indonesia mampu menjaga kedaulatannya secara teguh dan pemerintah negara lain dapat segan terhadap kedaulatan Indonesia. Namun, karena prinsip *zero enemy*, Indonesia seolah menjadi ragu ketika harus memberi tekanan pada negara lain.

Kesimpulan

Prinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara umumnya menggunakan landasan idiil, landasan konstitusional dan landasan operasional. Namun, pelaksanaannya sangat dipengaruhi kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional yang berlangsung. Merujuk pada *role theory*, identitas politik luar negeri Indonesia pasca reformasi juga memiliki identitas khas yang dipengaruhi rezim pemimpinnya.

Pada rezim Presiden Abdurrahman Wahid, identitas politik luar negeri Indonesia cenderung mengarah pada prinsip rasionalitas, dengan meletakkan presiden sebagai aktor dominan. Presiden melakukan hubungan luar negeri berdasarkan kepentingan, tanpa memandang blok dan latar belakang negara yang diajak kerja sama, dari segi apa pun, kecuali dari nilai yang menguntungkan. Selagi suatu negara dianggap memiliki potensi yang mampu memberikan

keuntungan positif bagi Indonesia dan mampu membantu Indonesia menyelesaikan permasalahannya, hubungan luar negeri pun bisa dijalin. Hanya saja, arah dari kebijakan tersebut, dianggap samar.

Pada rezim Presiden Megawati Soekarnoputri, identitas politik luar negeri Indonesia mengarah pada pembenahan pemerintahan melalui proses demokratisasi. Megawati cenderung menjadi sosok yang taat dan patuh terhadap birokrasi serta konstitusi sehingga langkah yang diambil banyak merujuk pada tata aturan pemerintahan yang ada. Dalam prakteknya, presiden tidak memegang peran dominan, dan justru banyak menyerahkannya pada menteri luar negeri, sejalan dengan amanat Undang-Undang. Arah politik luar negeri Indonesia juga masih tidak memiliki ketegasan, karena cenderung patuh terhadap pihak lain, yang dianggap memiliki *bargaining position* lebih tinggi, seperti IMF. Indonesia cenderung lebih dekat dengan blok barat, yang dianggap banyak membantu pemulihan stabilitas nasional Indonesia, sekalipun dengan mengajukan persyaratan khusus untuk dipatuhi Indonesia.

Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, identitas politik luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah mengandalkan pada diplomasi *soft power* yang cenderung menggambarkan lemahnya kedaulatan dan ketegasan Indonesia. Namun demikian, berbagai upaya ini tak lain bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, sekalipun dengan jalan penundukan diri terhadap tuntutan global. Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dan tindakannya terhadap kondisi global dan pihak lain, sehingga konektivitas tercipta dan prinsip *million friends, zero enemy* dapat terwujud.

Referensi

- Alami, Athiqah Nur. (2016). *Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru*. e-journal.lipi.go.id, p.163-181.
- Aritonang, Diro. (1999). *Runtuhnya Rezim dari pada Soeharto*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1999.
- Bakhtir, Nur alam. (2008). *99 Keistimewaan Gus Dur*, Cet. I. Jakarta : Kultura (Gaung Persada Press Group).
- Batabyal, A. (2016), "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy: From Sukarno, Suharto to Megawati", *Jadavpur Journal of International Relations*, Vol. 6 No. 1, pp. 29–44.
- Burnham, P. (2008), *Research Methods in Politics, Political analysis*, 2nd ed, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
- Chafetz, G., Spirtas, M. and Frankel, B. (1998), "Introduction: Tracing the influence of identity on foreign policy", *Security Studies*, Vol. 8 No. 2-3, pp. 7–22.
- Chase, S.E. (2005), "Narrative Inquiry. Multiple Lenses, Approach, Voices", in *Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research*, 3rd ed, Sage Publications, Thousand Oaks, pp. 631–680.

- Clark, M. (2011), "Indonesia's Postcolonial Regional Imaginary: From a 'Neutralist' to an 'All Directions' Foreign Policy", *Japanese Journal of Political Science*, No. 12, pp. 287–304.
- Creswell, J.W. and Poth, C.N., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches*, Fourth edition.
- Djalal, Dinopati. (2013). *Indonesia semakin Outward Looking*. *Tabloid Diplomasia* No 62, Tahun IV Indonesia, 15 Maret- 14 April 2013.
- Garrison, C.E. (2002), "Inadvertent Sociology: The Science and Religion Movement Meets Social Constructionism", *Sociological Focus*, Vol. 35 No. 3, pp. p 235-245.
- Hamim, Thoha. (2004). *Islam Dan NU Di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer [Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan Dan Sosial Masyarakat Muslim]*, Cet. I. Surabaya : Diantama.
- Hatta, M. (1988), *Mendayung antara Dua Karang*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Hellman, G. and Jorgensen, K.E. (Eds.) (2015), *Theorizing Foreign Policy in a Globalized World*, Palgrave Macmillan, London.
- Hudson, V.M. (2007), *Foreign policy analysis: Classic and Contemporary Theory*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Md.
- Kemlu. (2010). *Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Indonesia – Malaysia*, dalam <https://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Joint-Commission-for-Bilateral-Cooperation-JCBC-Indonesia---Malaysia.aspx>, diakses pada 1 Oktober 2018
- King, G., Keohane, R.O. and Verba, S. (2012), *Designing Social Inquiry: Scientific inference in qualitative research*, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- Mas'oed, M. (1990), *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- Merton, R.K. (1957). *Social theory and social structure*, NY: Free Press
- Naibaho, Juang. (2010). *Ini Kronologi Insiden di Perairan Indonesia*, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2010/08/15/ini-kronologi-insiden-di-perairan-indonesia>, diakses pada 1 Oktober 2018
- Negara, Surya dan Ahmad Mansyur. (1998). *Menemukan Sejarah*, Cet IV. Bandung: Mizan.
- Pfeffer, J. and Salancik, G.R. (1975). *Determinants of supervisory behavior: A role set analysis*. *Human Relations*, 28, 139-153
- Republik Indonesia. (2001). *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat*, pada 16 AGUSTUS 2001. Jakarta : Anri.
- Shambazy, Budiarto. (2010). *Politik Luar Negeri Gus Dur*. Dalam <https://tekno.kompas.com/read/2010/01/02/0253398/.politik.luar.negeri.gus.dur>. Diakses pada 11 Oktober 2018.

- Situmorang, Mangadar. (2014). *Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 66 di bawah Pemerintahan Jokowi-JK*. Bandung : materi Kegiatan Networking Kantor Sekretariat Wakil Presiden.
- Weinstein, F.B. (2007), *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto*, Equinox Publishing.
- Windiani, Reni. (2013). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi*. Ejournal UNDIP, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4894/4438> , diakses pada 11 Oktober 2018.